

**ANALISIS FRAMING JURNALIS DALAM PUBLIKASI KEKERASAN
ATAS NAMA AGAMA DI JAWA TENGAH**
(Pemahaman Jurnalis terhadap Regulasi Perundangan Pers)



Oleh:
Abaz Zahrotien
Nim: 1320512095

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik

YOGYAKARTA
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Abaz Zahrotien
NIM : 1320512095
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Saya yang menyatakan



Abaz Zahrotien, S.Sos.I
NIM : 1320512095

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Abaz Zahrotien
NIM : 1320512095
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Saya yang menyatakan



Abaz/Zahrotien, S.Sos.I

NIM : 1320512095



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS FRAMING JURNALIS DALAM PUBLIKASI KEKERASAN ATAS
NAMA AGAMA DI JAWA TENGAH (Pemahaman Jurnalis terhadap
Regulasi Perundangan Pers)
Nama : Abas Zahrotin, S.Sos.I.
NIM : 1320512095
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik
Tanggal Ujian : 19 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Humaniora (M.Hum).

Yogyakarta, 09 Juli 2015



Direktur,

Prof. Noorhaider, M.A., M.Phil., Ph.D.

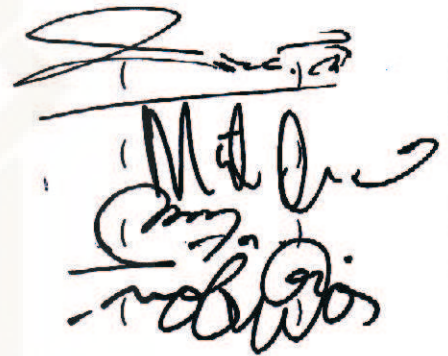
NIPN 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : ANALISIS FRAMING JURNALIS DALAM PUBLIKASI KEKERASAN
ATAS NAMA AGAMA DI JAWA TENGAH (Pemahaman Jurnalis
terhadap Regulasi Perundangan Pers)
Nama : Abas Zahrotin, S.Sos.I.
NIM : 1320512095
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Studi Agama dan Resolusi Konflik

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Dr. Mutiullah, M.Hum.
Pembimbing/Penguji : Dr. H. Hamdan Daulay, M.A.
Penguji : Dr. Robby Habiba Abror, M.Hum.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2015

Waktu : 12.30-13.30
Hasil/Nilai : 88,60/A-/3,50
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ / Sangat Memuaskan / ~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS FRAMING JURNALIS DALAM PUBLIKASI KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA

(Pemahaman Jurnalis Terhadap Regulasi Perundang-undangan)

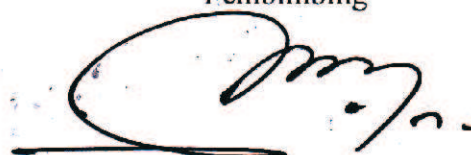
Yang ditulis oleh:

Nama	: Abaz Zahrotien
NIM	: 1320512095
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Studi Agama dan Resolusi Konflik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Humaniora.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2015
Pembimbing



Dr. Hamdan Daulay, MA

ABSTRAKSI

Eskalasi konflik dapat dipengaruhi oleh faktor publikasi media massa. Media massa dapat meningkatkan eskalasi konflik, tetapi dapat berperan sebaliknya, ia mampu meredam konflik dan bahkan menyelesaikan konflik. Dalam hal konflik agama, dimana tingkat sentimen masyarakat Indonesia yang tinggi akan mampu berkembang menjadi konflik yang semakin besar apabila publikasi yang disiarkan media bersifat provokatif dan memancing reaksi.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui latar belakang jurnalis sebagai salah satu faktor dalam publikasi produk jurnalistik. Dengan mengetahui latar belakang jurnalis serta faktor-faktor yang mempengaruhi produk jurnalistik mereka, maka akan memiliki pula gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang memproduksi produk jurnalistik. Dalam hal ini, peneliti melakukan pendekatan terhadap narasumber dengan pendekatan psikososial antropologis. Pendekatan secara psikologis dilakukan untuk mengetahui gambaran psikologis diri jurnalis sedangkan pada lingkup sosial diarahkan untuk mengetahui kondisi jurnalis dan lingkungan kerja sekitar mereka, termasuk faktor-faktor yang memberi pengaruh terhadap produk jurnalistik. Sebagai produk lapangan metode penggalan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, kajian dokumen dan literer. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi wilayah jurnalis di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah dengan tingkat konflik atas nama agama tertinggi di provinsi ini.

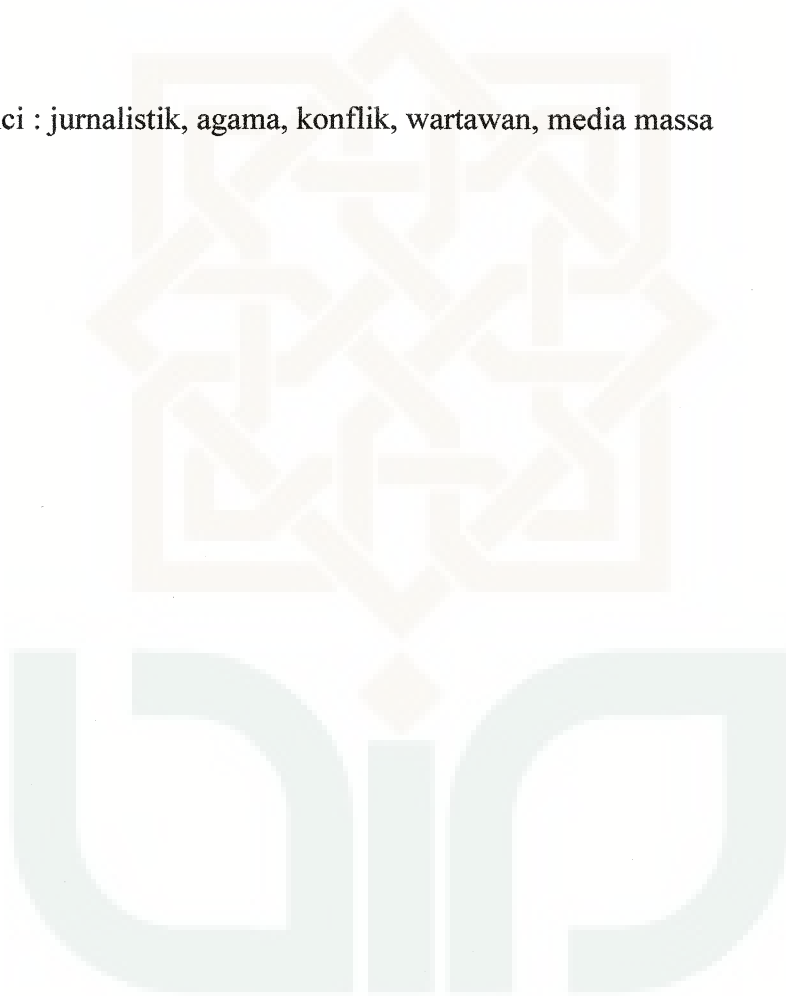
Penelitian yang dihasilkan dalam penyusunan produk ilmiahnya menyandarkan pada beberapa teori, pertama adalah teori analisis framing, sebuah teori dalam ilmu komunikasi yang terbilang baru untuk membaca faktor-faktor lain dalam pembentukan sebuah produk jurnalistik. Selain analisis framing, sandaran yang digunakan lainnya adalah teori *peace journalism* yang pertama kali diperkenalkan Johan Galtung dan dikembangkan oleh Jake Lynch dan Annabel McGoldrick. Terakhir, teori yang juga digunakan untuk melengkapi adalah sembilan elemen jurnalisme yang merupakan hasil penelitian dari Bill Kovach.

Dari penelitian ini ditemukan masih banyak faktor yang menjadi penghambat seorang jurnalis dalam menyusun produk jurnalistik. Pertama, pemahaman terhadap regulasi yang mengikat pekerjaan mereka masih rendah. Kedua, aplikasi dari produk perundang-undangan masih rendah diantaranya karena faktor gratifikasi, dependensi, tradisi *copy paste* dan faktor pengaruh dari perusahaan media. Dalam analisis regulatif, menjadi dasar bagi jurnalis yang ingin

membuat berita heboh (*headline*) namun mengabaikan prinsip-prinsip dan aturan dalam konflik bernuansa SARA sehingga kerap memicu reaksi dari pembaca atau pemirsa media massa tersebut.

Sampling yang diambil secara acak dari publikasi kekerasan atas nama agama yang terjadi pada wilayah penelitian menunjukkan masih banyak kelemahan-kelemahan jurnalis dalam membuat produk jurnalistik, dimana hasil dari berita dapat memicu reaksi yang berlebih dari pembacanya.

Kata kunci : jurnalistik, agama, konflik, wartawan, media massa



MOTTO

Gagal adalah pelajaran

Dimana ada kemauan, disitu ada jalan



Persembahan

Dipersembahkan kepada:

Bapak dan ibu

H. Ali Ma'sum dan Hj. Sarkinah

Ayah dan Bunda

Drs. Edy Riyanto, M.M. dan Dra. Teguh Hartati

Serta semua saudara-saudara

I Love You

KATA PENGANTAR

Allah dan kemahabesaran-Nya adalah hal pertama yang harus disyukuri, atas kuasa-Nya, peneliti dengan berbagai kendala yang dihadapi telah menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai penerang dan pembawa kabar gembira.

Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah jurnalis di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini, tentu bukan sebuah penelitian lengkap yang membahas secara utuh keseluruhan faktor-faktor yang dibidik dalam tema tesis, meski hanya sebagai kulit dari keseluruhan, namun hal ini adalah produk yang dapat dikerjakan peneliti secara optimal.

Sebagai sebuah proses aplikasi dan pengembangan keilmuan akademik, diharapkan penelitian ini juga memberi dampak positif bagi para peneliti selanjutnya yang mengangkat tema yang sama secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini juga perlu disampaikan sejumlah narasumber yang digunakan menolak untuk disebutkan namanya, namun informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini karena apa yang disampaikan oleh wartawan yang bersangkutan sangat kritis dan menyinggung perusahaan media yang mempekerjakannya dan atau relasi yang menjadi sumber beritanya. Untuk

menjaga semua itu, peneliti memilih untuk tidak mencantumkan nama narasumber yang bersangkutan dalam penulisan tesis ini.

Penyelesaian rangkaian penelitian dan penyusunan tesis merupakan hal panjang yang juga mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pejabat dan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D (Rektor), Prof. Noorhaidi Hasan, M.A. Ph.D (Direktur Pascasarjana), para guru besar dan seluruh staf pengajar yang telah memberikan ilmunya selama proses pendidikan.
2. Dr. Moch. Nur Ichwan, MA (Kaprodi AF), Dr. Mutiullah (Sekretaris Prodi AF) dan Hartoyo (Staff Prodi AF) yang telah membantu proses birokrasi dan akademik selama proses pendidikan.
3. Bapak dan Ibu, H. Ali Ma'sum dan Hj. Sarkinah serta ayah dan bunda, Drs. Edy Riyanto, MM dan Dra. Teguh Hartati yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya selama ini. Serta semua saudara-saudaraku, I Love You.
4. Rekan-rekan wartawan di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo yang telah memberikan lebih dari apa yang diharapkan. Serta para pemerhati dan praktisi yang turut memberikan pemikirannya untuk memperkaya isi penelitian ini.

5. Teman-teman Studi Agama dan Resolusi Konflik (SARK) 2013 yang menjadi penyemangat dan partner yang luar biasa.
6. Keluarga besar Perumahan Candiasri, Candimulyo, Kedu, Temanggung serta Komunitas Fotografi Temanggung (Koforte), Jaringan GUSDURian Temanggung serta seluruh pihak yang telah membantu.

Sebagai sebuah penelitian awal, tentu masih banyak yang dapat dikembangkan secara lebih spesifik dan luas kedepannya. Tentu pula, kesalahan dan kekeliruan masih mewarnai tesis ini. Peneliti berharap ini merupakan pondasi awal yang dapat dikembangkan lebih kedepannya. Terima kasih dan semoga memberikan manfaat.

Yogyakarta, 5 Juni 2015
Penulis

Abaz Zahrotien
NIM : 1320512095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
DEWAN PENGUJI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II JURNALISME DAN KOMUNIKASI PUBLIK	27
A. Teori Komunikasi Massa	36
B. Peran dan Fungsi Komunikasi Massa (Pers)	54
C. Pers di Indonesia	66
D. UU No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik	75
E. Analisis Framing	90
F. Peace Journalism	99
BAB III JURNALIS DAN KONFLIK ATAS NAMA AGAMA	108
A. Sembilan Elemen Jurnalisme	116
B. Konflik atas Nama Agama	141
BAB IV KUALITAS DAN INDEPENDENSI WARTAWAN	166
A. Kualitas Wartawan	169
B. Gratifikasi dan Independensi	202
BAB V FRAMING WARTAWAN DAN KONFLIK ATAS NAMA AGAMA	216
A. Kekerasan beragama di Jawa Tengah	223
B. Analisis Framing Publikasi Kekerasan Beragama	231
C. Analisis Framing Jurnalis (Analisis Regulator)	248
D. Publikasi Kekerasan Agama dan Problem Wartawan	256
BAB VI PENUTUP	314
A. Kesimpulan	314

B. Saran	317
DAFTAR PUSTAKA	319
DAFTAR NAMA NARASUMBER	325
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	332



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2014, sejumlah kekerasan atas nama agama menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan di media massa. Isu tentang kekerasan beragama dan berkeyakinan bahkan menjadi masalah yang serius tidak hanya di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia. Fenomena Islamic State of Iraq and Syira (ISIS) menjadi sorotan paling tajam disusul dengan sejumlah isu-isu lama yang mencuat kembali seperti Taliban dan gerakan terorisme internasional lainnya.

Di Indonesia sendiri, kekerasan atas nama agama sepanjang tahun tersebut muncul cukup banyak. The Wahid Institute mencatat selama tahun tersebut muncul sebanyak 158 kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia. Jumlah tersebut dihitung dari 18 wilayah yang dipantau lembaga ini, masing-masing di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Maluku Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, dan Papua.¹

¹ Data-data diperoleh dari mengikuti Pers Conference yang diselenggarakan oleh The Wahid Institute Jakarta dan siaran pers The Wahid Institute melalui *official sites* <http://www.wahidinstitute.org>

Dalam *pers conference*, yang dilangsungkan di Kantor The Wahid Institute Jakarta, 29 Desember 2014, Direktur The Wahid Institute, Zannuba Arifah Chafsoh Wahid menyebutkan, jumlah kasus tersebut dilihat dari sisi pelaku, negara sebagai aktor pelanggaran KBB tercatat di 80 kasus. Di 78 kasus lainnya dilakukan aktor non-negara. Keterlibatan negara muncul karena pemerintah setempat atau aparat keamanan ikut mengambil keputusan saat pelaku intoleran melaporkan kelompok minoritas yang dinilai mengganggu lingkungannya.

Catatan The Wahid Institute menunjukkan terjadi penurunan kasus kekerasan atas nama agama dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 245 kasus. Meski mengalami penurunan jumlah kasus, namun Yenny Wahid menilai tidak ada peningkatan tanggungjawab negara dalam menyelesaikan masalah mendasar dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Faktor yang paling menonjol dari penurunan angka kasus kekerasan beragama selama kurun waktu tersebut adalah, setiap kasus kekerasan beragama yang terjadi di Indonesia tidak pernah menjadi fokus utama pemberitaan media (*headline*) karena isu kekerasan beragama dikalahkan dengan isu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan tidak menjadi bahan pemberitaan utama, maka kasus kekerasan atas nama agama dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan cukup drastis.

Riset yang dilakukan The Wahid Institute menunjukkan, peran media menjadi sangat penting dalam terjadinya konflik. Bahwa media memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan kekerasan atas nama agama

yang terjadi di Indonesia. Semakin sering konflik kekerasan atas nama agama ditayangkan dalam pemberitaan dan menjadi *headline*, maka semakin tinggi angka kekerasan atas nama agama yang terjadi pada kurun waktu tersebut. Indonesia beruntung terjadi pemilihan umum dua kali dalam satu tahun sehingga cukup mampu menggeser isu kekerasan beragama dari panggung *headline* media massa. Beberapa kasus bahkan kandas ditengah jalan dalam arus pemberitaan manakala tertabrak oleh isu-isu yang lebih hangat soal politik.

Media merupakan suatu organisasi terstruktur, yang menjadi agen penyedia informasi bagi masyarakat. Peranannya sangat penting dalam proses pembentukan opini dan cara pandang masyarakat. Media yang memiliki jangkauan luas, maka akan semakin luas pula dampak media bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif dari adanya pemberitaan. Bagi pemberitaan yang berdampak baik, kedatangan media merupakan kabar gembira dimana publik akan merasakan secara langsung dan tidak langsung dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pemberitaan. Namun, media juga dapat bertindak sebaliknya, dia dapat menjadikan alat pemicu konflik dan timbulnya konflik sosial. Banyak pengamat melihat bahwa media juga turut memberikan andil dalam terjadinya konflik akibat berita yang diunggahnya. Keberadaan media mampu mengubah cara pandang yang sebelumnya positif menjadi negatif, yang sebelumnya normatif menjadi agresif dan seterusnya.

Adorno dan Horkheimer (1972) melihat propaganda yang sangat kuat datang dari media dalam menjelaskan peristiwa berdarah Holocaust dan peristiwa-peristiwa brutal lainnya yang terjadi ketika Perang Dunia Ke-II. Chomsky dan Herman (1988) melihat bahwa media merupakan kurir yang sangat kuat dalam mempromosikan ideologi baru kepada anggota masyarakat yang memiliki tingkat melek media yang rendah, anak-anak misalnya.²

Perkembangan global yang hanya dalam satuan detik perkembangannya memicu kebutuhan informasi terhadap perkembangan tersebut juga dalam waktu yang cepat. Semakin cepat informasi atas perkembangan yang terjadi dapat lebih mudah diakses, maka semakin mempercepat pula tingkat pengetahuan publik atas perkembangan yang terjadi.

Apabila masyarakat dalam era sebelumnya tidak terlalu mengedepankan akses informasi, maka pada zaman sekarang informasi menjadi faktor paling utama untuk beragam kebutuhan. Tingkat kebutuhan tersebut juga semakin meningkat setiap tahunnya mengingat terjadi pergeseran tatanan sosial dari yang semula tidak membutuhkan informasi menjadi masyarakat yang mengandalkan informasi sebagai kebutuhan pokok.

Tidak hanya untuk kepentingan pengayaan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, percepatan informasi juga menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan dunia usaha. Saat ini, hampir sebagian besar bidang usaha mendasarkan pada kebutuhan teknologi informasi, yang tentu membutuhkan kecepatan akses informasi agar perkembangan bidang usaha

² J. Severin, Werner. W. Tankard, James Jr.. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), hlm. 47.

tersebut semakin maju. Perkembangan dunia usaha yang menggantungkan pada percepatan akses informasi ini mengisyaratkan bahwa kebutuhan akan informasi merupakan hal yang paling pokok dan menunjang aktivitas lainnya.

Meski memiliki kebebasan penuh, namun media memiliki *social responsibility*, pola pertanggungjawaban sosial. Media harus mempertanggungjawabkan apa yang ditulis atau ditayangkan dihadapan publik. Setiap problem atau informasi yang ditampilkan mengandung unsur-unsur yang harus tidak bertentangan dengan etika sosial atau hukum-hukum adat.

Dalam hal ini, media meskipun memiliki hal yang tidak terbatas dalam penyajian informasi dan data, namun tetap harus mengindahkan kondisi, hukum dan sistem sosial. Dimana ia tidak memiliki kebebasan dalam menyangkut hal-hal yang sudah menjadi ketentuan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu hukum tertulis maupun hukum-hukum yang tidak dicantumkan dalam literasi.

Termasuk dalam konflik, media yang memiliki kebebasan menampilkan semua persoalan yang terjadi menyangkut konflik tersebut, namun harus tetap melihat hal-hal tersebut diatas. Fenomena sosial harus diperhitungkan karena media harus mempertanggungjawabkannya dihadapan publik.

Sebagai media yang memiliki kebebasan penuh atas penyebaran informasi, ia dapat saja menjadi jurnalisme yang menentramkan dan mendamaikan, tetapi juga dapat berbuat sebaliknya. Ia menjadi pemicu persoalan lebih provokatif dan menjadikan persoalan kecil menjadi persoalan

yang sangat besar dan menjadi polemik. Kendati memperoleh berita yang berimbang, namun tetap saja informasi yang disajikan akan mampu menyebabkan kedua hal tersebut diatas.

Secara teoritis, ada tiga posisi media, menurut Yasraf Amir Pilliang.³ dalam memberitakan konflik. Pertama, media sebagai *issue intensifier*, dimana media berposisi sebagai penguat munculnya isu atau konflik, serta mempertajamnya. Isu yang diangkat akan menampakkan dimensi-dimensi secara tajam. Dan dengan posisi sebagai intensifier, maka media mem-*blow-up* realitas yang jadi isu, sehingga seluruh dimensi isu menjadi transparan.

Kedua, media sebagai *conflict diminisher*. Yakni media menenggelamkan suatu isu atau konflik. Secara sengaja, media meniadakan isu tersebut. Terutama bila menyangkut kepentingan media bersangkutan, entah kepentingan ideologis atau pragmatis. Dan ketiga, media juga bisa berfungsi menjadi pengarah *conflict resolution*. Yakni menjadi mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif, dan mengarahkan pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.

Fungsi media tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dalam memberikan gambaran mengenai informasi, media akan selalu memberikan dampak, baik positif maupun negatif terhadap konflik. Dalam hal teknis detil seperti pemilihan diksi dan sudut pandang adalah hal yang paling menonjol yang harus diperhatikan.

³ Yasraf Amir Pilliang, *Hipерsemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, (Jalasutra: Yogyakarta, 2003), hlm 56.

Tugas jurnalisme damai menurut Galtung adalah untuk memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, menganalisis tujuan dan memberikan *problem solving* atas konflik tersebut.⁴

Jurnalisme damai pada dasarnya hanyalah sekedar opsi. Jurnalisme bisa mengadopsi atau bahkan mengabaikannya. Namun, keberadaan pers bukanlah sekedar sebagai *mirror of reality*, tetapi juga *molder of reality* (pembentuk rupa) masyarakat. Jika keberadaan jurnalisme adalah dalam rangka menjalankan fungsi pembentuk rupa masyarakat, maka seyogyanya jurnalisme damai menjadi opsi yang tak terelakkan.

Galtung memaparkan, jurnalis harus mampu mentransformasikan fakta-fakta dan realitas konflik sebagai realitas media. Peran jurnalisme damai harus menjadi bank data wacana yang tidak menciptakan potensi menggagas konflik dan perpecahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jurnalisme damai bisa dilaksanakan dengan standar jurnalisme modern, yaitu memegang asas imparsialitas dan faktualitas, dengan prinsip-prinsip menghindari kekerasan.

Di Indonesia dengan beragam media massa yang ada tentu juga mengalami polemik terkait jurnalisme damai dan jurnalisme perang sebagaimana yang telah digambarkan diatas. Baik media cetak, elektronik maupun online, ketiganya tidak bisa lepas dari mengambil posisi diantara dua pilihan tersebut, meskipun secara kasuistik.

⁴ Jake Lynch and Annabel McGoldrick, *Peace Journalism*, (Stroud: Hawthorn Press, 2005), hlm. 84

Dalam hal pemberitaan, pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan didalamnya ditegaskan tentang kewajiban memegang Kode Etik Jurnalistik. Kedua landasan tersebut merupakan regulasi yang mengatur tentang hulu dan hilir pemberitaan sehingga menghasilkan pemberitaan yang berimbang, tidak berat sebelah serta meminimalisir terjadinya konflik turunan, termasuk didalamnya konflik yang bernuansa SARA.

Meski telah ada peraturan perundangan tersebut, namun belum sepenuhnya jurnalis menerapkan sesuai dengan regulasi. Bahkan dalam analisis media menunjukkan, acapkali jurnalis melakukan kesalahan penulisan dan penggambaran tentang kondisi sesuatu secara berlebihan. Tindakan tersebut dapat meningkatkan intensitas konflik sehingga dapat memicu konflik menjadi lebih besar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jurnalis memahami tentang ilmu komunikasi dan regulasi perundang-undangan yang membahas tentang bidang tugas mereka?
2. Bagaimana jurnalis menerapkan regulasi perundang-undangan dalam publikasi berita bernuansa SARA?
3. Bagaimana jurnalis menerapkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana peranannya dalam penulisan berita bernuansa SARA?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan dan manfaat menjadi dasar. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hasil akhir dari serangkaian penelitian dan pengamatan yang dilakukan sehingga problem yang diangkat dapat memunculkan rekomendasi penyelesaian. Adapun secara detail tentang tujuan dan manfaat sebagai berikut:

5. Tujuan

Dalam penelitian terkait analisis media ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada dampak dan solusi. Adapun secara spesifik peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memetakan pemberitaan konflik berdasarkan analisis media serta menemukan penyebab berkembangnya konflik akibat pemberitaan media massa.
- b. Memetakan penyebab terjadinya konflik yang bersumber dari pemahaman wartawan yang tidak tepat.
- c. Menemukan *problem solving* pelaku pemberitaan dalam hal penggunaan diksi, *angle* dan penerapan pola pemberitaan sesuai regulasi perundang-undangan.
- d. Mempopulerkan *peace journalism* dalam pemberitaan di kalangan wartawan sehingga meminimalisir terjadinya konflik turunan akibat pemberitaan.

6. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang tertera sebelumnya, peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat membawa manfaat bagi penyelesaian konflik secara khusus dan pola penerapan pemberitaan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi bagi awak media untuk menerapkan pola *peace journalism* dalam pemberitaan konflik.
- b. Memberikan solusi atas ketidaktepatan penggunaan angle, diksi dan analisis konflik dalam pemberitaan kepada awak media sehingga tidak ditemukan kembali adanya konflik turunan.
- c. Meminimalisir terjadinya konflik yang lebih besar sebagai dampak dari pemberitaan yang tidak mendasarkan pada regulasi perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengarahkan media pada kesadaran positif untuk menjadi media yang membawa prinsip perdamaian dalam pemberitaan serta mengurangi tingkat provokasi negatif yang dilakukan media melalui berita yang ditampilkan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang media massa dengan menggunakan berbagai pendekatan telah banyak dilakukan berbagai kalangan. Biasanya, penelitian media banyak menggunakan analisis media, analisis isi dan analisis semiotik

sesuai dengan konsentrasi peneliti. Penelitian media massa menggunakan analisis framing masih terbilang tidak terlalu banyak, khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini didasarkan analisis framing merupakan salah satu model pendekatan yang dikenalkan paling belakang setelah pendekatan-pendekatan sebelumnya.

Meski demikian, penelitian menggunakan analisis framing juga masih spesifik membandingkan antarmedia. Analisis framing oleh para peneliti sebelumnya lebih digunakan untuk membandingkan satu media dengan media yang lainnya dalam kaca mata konflik tertentu. Salah satunya yang dilakukan oleh Yunindar Z.A, dalam tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang mengambil judul Analisis Framing terhadap pemberitaan Kompas dan Republika selama enam bulan darurat militer di NAD: 19 Mei - 19 November 2003.

Analisis framing lainnya, diarahkan pada mendalami satu media tertentu saat melakukan pemberitaan tentang suatu tema tertentu. Dalam hal ini, Alimuhsin dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menerbitkan karya ilmiah tesisnya yang berjudul Analisis Framing Paparan Konflik Agraria Perkebunan di harian Kompas Periode 2004-2009.

Penelitian lainnya yang telah dilakukan tentang tema ini adalah Eka Nugraha Putra dari Universitas Indonesia dalam tesis berjudul *Mass media and the Role in Criminal Policy*. Dari lembaga yang sama, Kristanto Hartadi juga melakukan penelitian dengan judul *Framing Analysis a Case Study on*

Kompas and Media Indonesia in Covering Riot in Temanggung, Februari 8, 2011.

Dari penelitian-penelitian tersebut, sebagian besar analisis framing masih digunakan sebagai suatu pendekatan untuk meneliti media. Hal yang baru yang mencoba dikenalkan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis framing digunakan untuk meneliti pelaku penulis berita (jurnalis), sebagai orang pertama yang melakukan penulisan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Komunikasi

Pada dasarnya, informasi tidak lebih sebagai *messages* yang disampaikan komunikator terhadap komunikan. Unsur utama yang paling harus diperhatikan adalah pesan yang disampaikan dalam informasi tersebut. Soal mekanisme penyampaian dan media apa yang digunakan tidak terlalu menjadi soal prioritas. *Messages* menjadi puncak tertinggi dalam kasta kebutuhan informasi dibanding melihat sisi media yang digunakan.

Sebagai kasta tertinggi, *messages* memiliki banyak kemanfaatan bagi masyarakat, baik itu manfaat positif maupun manfaat negatif yang mampu menciptakan respon yang beragam. Respon positif diberikan apabila *messages* yang diterima berbanding lurus dengan harapan komunikan dan respon negatif muncul sebagai bentuk reaksi atas *messages* yang bertolak belakang dengan keinginan komunikan itu

sendiri. Hal ini lebih terkait dengan psikologi seseorang, baik psikologi pribadi maupun psikososial.

Tentang *messages* sebagai inti dari komunikasi, ia harus datang dengan dua hal, yakni akurasi dan tepat waktu. Semakin *messages* yang disampaikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka semakin dapat dipercaya media yang digunakan untuk menyampaikan *messages* dan semakin cepat dan tepat waktu *messages* tersebut disampaikan, maka akan semakin melengkapi syarat sebagai media penyampai pesan yang bonafid.

Nilai akurasi diukur dari validitas data yang disajikan dan sumber data yang memiliki kredibilitas yang memadai. Misalnya, menyajikan informasi (*messages*) tentang perkembangan data bunga bank, maka yang memiliki kredibilitas untuk menyampaikan adalah bankir. Akan menjadi nilai yang berbeda dan lebih rendah manakala informasi tentang perkembangan bunga bank yang menyajikan adalah nasabah bank.

Pesan yang baik pada dasarnya lebih pada penekanan substansi *messages* yang dapat dipetik oleh penerima pesan. Maksud dapat diterima dan diterjemahkan dengan jelas. Untuk mencapai hal tersebut, pesan juga harus dikemas dalam bahasa yang jelas dan pemilihan yang tepat. Dengan pengemasan yang mudah dipahami maka maksud dapat tersampaikan. Banyak pesan yang disampaikan namun tidak dapat dipahami oleh komunikan lantaran cara penyampaian dan isi pesan tidak dikemas dengan baik.

Perlu dipahami juga subjek komunikan, apabila komunikan merupakan individu, maka penyikapan pola komunikasi akan berbeda ketika menggunakan sistem komunikasi massa. Hal ini juga terkait dengan *messages*, sistematika dan media komunikasi yang digunakan. Memetakan komunikan menjadi penting untuk menentukan reaksi dari komunikan atas *messages* yang diterima.

Dalam teori komunikasi, posisi komunikan dan komunikator adalah subjek yang antara satu sama lain diikat oleh *messages*. Untuk mencapai pola ikatan yang diharapkan, maka *messages* harus dikemas dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan tanggapan (*misreaction*). Kesalahan tanggapan akibat pengemasan *messages* yang tidak tepat ini adalah salah satu dampak pola penerapan komunikasi yang tidak tepat.

Berbeda dengan komunikasi individu, komunikasi massa jauh lebih kompleks. Ia membutuhkan banyak teori dan sistem sehingga *messages* yang disampaikan benar-benar dapat diterima oleh komunikan. Tentu ini tidak mudah karena komunikan yang heterogen dengan perbedaan psikologis yang menentukan reaksi berbeda terhadap *messages*. Untuk mencapai tujuan komunikasi, prinsip-prinsip teori komunikasi harus diterapkan.

Rogers dan D. Lawrence Kincaid (1981) menafsirkan komunikasi suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan

pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.⁵

Teori komunikasi menurut Littlejohn⁶ secara umum dibagi dalam dua kategori, yakni *general theories* (teori-teori umum) dan *contextual theories* (teori kontekstual). Untuk kategorisasi pertama dibagi dalam empat garis besar, yakni teori fungsional dan struktural tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada diluar diri pengamat, lalu teori *behavioral* dan *cognitive* yang memusatkan pengkajiannya pada diri manusia secara individual. Ketiga teori konvensional dan interaksional yang menyebut bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol, lalu terakhir teori kritis dan interpretif yang memahami pengalaman hidup manusia atau untuk menginterpretasikan makna-makna teks.

Kategorisasi kedua, yakni *contextual theories*, dibagi dalam lima kelompok, yakni *intrapersonal communication* (komunikasi intrapersonal), *interpersonal communication* (komunikasi interpersonal), *group communication* (komunikasi kelompok), *organizational communication* (komunikasi organisasi) dan *mass communication* (komunikasi massa).

Fokus pada pembahasan *contextual theories*, dibanding empat pembagian yang lainnya, *mass communication* memiliki pengaruh paling

⁵ Canggara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 78

⁶ Rogers, Everett M. *Communication Technology The New Media in Society*, (London: The Free Press, 1986), hlm. 156.

besar dalam pembentukan opini publik. Sebab, jangkauan informasi (*messages*) yang disampaikan lingkupnya menyeluruh tanpa dibatasi. Hal tersebut membawa pembagian ini jauh lebih kompleks pembahasannya ketimbang pembagian yang lain. Harus memperhatikan pula dampak dari komunikasi yang sifatnya terbuka tersebut.

Dalam komunikasi massa, medium (perantara) sangat dibutuhkan. Jangkauan yang luas memaksa penggunaan medium harus digunakan agar pesan yang disampaikan mampu terdistribusikan dengan luas. Semakin medium yang digunakan efektif, maka semakin luas pula jangkauan pesannya. Medium yang digunakan untuk pola komunikasi ini diantaranya adalah media massa, baik koran, televisi, majalah, radio, internet ataupun medium lainnya yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kategorisasi, yakni media elektronik, media cetak dan media *on line*.

2. Analisis Framing

Pada dasarnya, berbagai regulasi yang muncul untuk mengatur pemberitaan di media massa sudah sedemikian rapi. Bahkan, di Indonesia telah dibentuk komisi-komisi khusus yang mengawasi pemberitaan media. UU Pers, UU Keterbukaan Informasi Publik, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Delik Pers dan sebagainya merupakan produk hukum yang memiliki citra ideal pemberitaan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan berbagai komunitas atau lembaga pewartanya juga berperan dalam pengawasan pemberitaan di Indonesia.

Secara umum, baik regulasi maupun sistem yang diterapkan untuk pengawasan dan kontrol berita di Indonesia sudah cukup baik. Dari sisi yuridis telah memiliki legitimasi yang kuat dan institusi pengawasan juga telah didirikan sebagai bentuk benteng pemberitaan yang menyimpang, sekaligus sebagai fasilitator ketika muncul polemik yang berkepanjangan.

Namun demikian, tampaknya penerapan pola pemberitaan masih belum menunjukkan peran positif dalam upaya media sebagai langkah untuk tidak memperkeruh konflik serta membawa kedamaian. Dalam pemberitaan konflik justru media masih mengambil sudut pandang (*angle*) yang ekstrim ketimbang harus membawa kabar yang membuat pembaca merasa damai.

Membagi jurnalisme dalam dua kategori, yakni *peace journalism* dan *wars journalism*, di Indonesia mengambil sudut pandang konflik dengan *wars journalism* masih sangat menonjol. Tidak hanya tema dan sudut pandang yang diambil, tetapi juga hingga lebih detail pada penggunaan bahasa dan pemilihan kata (diksi).

Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang fenomena pemberitaan dalam konflik dari beberapa sampling media yang akan diteliti. Adapun persoalan yang spesifik akan diangkat dalam kajian analisis framing jurnalis adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman pewarta dan awak media terhadap regulasi perundang-undangan.

- b. Analisis diksi dalam berita konflik.
- c. Pemilihan narasumber, sudut pandang (*angle*) dan penggunaan istilah khusus.

Dari tiga hal tersebut selanjutnya dapat dikembangkan secara lebih luas sehingga dapat mengetahui lebih mendalam tentang pemberitaan konflik sehingga memunculkan rekomendasi untuk memberikan sumbangsih untuk mengarahkan media sebagai pelaku tindak perdamaian dalam konflik tanpa mengurangi substansi pemberitaan.

3. Peace Journalism

Teori tentang jurnalisme damai diperkenalkan oleh Johan Galtung, teori ini menjadi salah satu landasan teori dalam penelitian yang dilakukan dengan asumsi bahwa *peace journalism* mampu menjadi citra ideal dalam pemberitaan konflik di media massa. Hal yang melatarbelakangi Galtung menulis temuannya ini adalah, latar belakang media yang pada zamannya menuliskan secara hitam putih, kalah menang. Ia melihat, jurnalis di eranya sangat vulgar dalam memberikan informasi dan lebih mengejar sensasional berita ketimbang berperan dalam konflik itu sendiri⁷.

Dalam teorinya, Galtung membagi jurnalisme dalam dua kategori besar, yakni *peace journalism* dan *war journalism*. Keduanya saling berhadapan dan mengenalkan pola pemberitaan yang berbeda dalam satu kasus. Apabila *peace journalism* mencoba meredam konflik tertentu yang

⁷ Jake Lynch and Johan Galtung, *Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism*, (Australia: Queensland University Press), 2010, hlm. 137.

terjadi, maka *war journalism* bertindak sebaliknya, ia berusaha mengobarkan konflik agar semakin berkembang lebih besar. *War journalism* tidak hanya mengorbankan konflik dalam penampilan berita, melainkan juga memotret konflik yang terjadi secara telanjang. Bahkan, fokusnya diarahkan pada kekerasan yang terjadi sebagai penyebab. Ia selalu menolak untuk melakukan kajian terhadap sisi psikologis korban.

Galtung menerangkan, jurnalisme memiliki tujuan sebagai alat pemenuh kebutuhan informasi masyarakat. Tujuannya sendiri adalah agar masyarakat dapat hidup bebas dan dapat mengatur dirinya sendiri. Objektivitas dalam metode untuk akurasi dan validasi data benar-benar ditinggalkan. Metode meninggalkan objektivitas sendiri dilakukan melalui pengabaian prinsip *check and balance*, *cover both side*, *cover all sides* dan prinsip independensi media⁸.

4. Hipotesis

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, mendasarkan pada asumsi negatif bahwa banyak kalangan jurnalis, baik media cetak, elektronik maupun online yang belum memahami dengan baik serta menerapkan dengan baik landasan perundang-undangan serta hukum turunan lainnya dalam menjalankan fungsinya.

Dengan adanya pemahaman yang masih kurang, pihak media atau aliansi kewartawanan yang diikuti juga tidak menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (wartawan) itu

⁸ Richard Keeble, John Tulloch and Florian Zollmann (eds), *Peace Journalism, War and Conflict Resolution*, (London: Peter Lang Inc., 2010), hlm. 81.

sendiri sehingga kurang begitu mendalami tentang prinsip dan etika jurnalistik. Hal yang seringkali ditonjolkan oleh media itu sendiri adalah menciptakan berita yang fenomenal, besar dan berhasil merebut perhatian publik tanpa harus memikirkan dampak dari pemberitaan itu sendiri.

Faktor lainnya, bahwa awak media (wartawan) lebih cenderung membuat sudut pandang (*angle*) yang fenomenal dengan memilih narasumber tertentu sesuai dengan keinginannya atau berdasarkan kedekatan emosional dengan narasumber tersebut. Hal ini akan berdampak pada hasil berita yang ditulis yang kemudian akan membawa dampak-dampak sebagaimana digambarkan diawal sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang dilakukan, sifat dari penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori konflik dan teori komunikasi massa. Dalam *field research* ini, peneliti akan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subjek-subjek penelitian.

Penelitian sendiri diarahkan pada jurnalis yang telah terlibat dalam pemberitaan konflik bernuansa SARA yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Namun untuk lebih spesifik kemudian penelitian diarahkan ke Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah penelitian lebih detailnya di Kota

Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

2. Informan dan Subjek Penelitian

Para informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah jurnalis yang pernah menulis berita tentang konflik yang bernuansa SARA di Indonesia. Pemilihan wartawan didasarkan pada media masing-masing (kualitas wartawan selanjutnya tidak mewakili kualitas media). Untuk menjaga kredibilitas dan nama baik narasumber, dalam penelitian ini tidak seluruhnya menyebut identitas narasumber, meski demikian beberapa sumber yang mendapatkan izin untuk mencantumkan identitasnya akan tetap dicantumkan.

3. Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan model wawancara dengan sejumlah wartawan di daerah yang pernah terjadi konflik. Selain wawancara yang dilakukan secara mendalam, juga akan menggunakan model observasi untuk melihat latar belakang, interaksi, individu, kelompok dan pekerjaan wartawan yang bersangkutan.

Untuk memperkuat hasil wawancara, juga akan dilakukan *library research* dengan mencari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan penelitian yang diangkat. Penggunaan model ini diupayakan dapat membantu menemukan hal-hal yang belum ditemukan jawabannya selama proses wawancara dan pengamatan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan psikososial dan antropologi, yakni pendekatan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan, secara lebih spesifik mempelajari wartawan dengan lingkup kebiasaan (*habit*) aktivitas pekerjaannya. Pendekatan antropologi ini juga mendekatkan pada model holisme, yakni pandangan bahwa praktik-praktik sosial harus diteliti dalam konteks dan secara esensial dilihat sebagai praktik yang saling berkaitan dengan yang lainnya dalam lingkup yang sedang diteliti.

Pendekatan antropologi holisme ini tidak hanya melihat wartawan dan aktivitas pekerjaannya saja, melainkan juga harus mengaitkan aspek ekonomi, sosial, budaya, agama dan berbagai bidang lainnya. Analisis framing yang digunakan sebagai alat pembedah juga mengarahkan tentang memilih narasumber yang tepat yang aspek-aspek lain seperti sosial, psikologi, budaya atau agama berkorelasi dengan wartawan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Observasi Partisipan-Terbuka (*Participant Absobsever*)

Langkah ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang diteliti. Observasi dilakukan tanpa

merekayasa dan digambarkan dengan fenomena yang utuh. Dalam hal ini, langkah observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas jurnanisme para jurnalis yang pernah atau sedang meliput berita tentang konflik yang bernuansa SARA.

Selama observasi ini, juga memungkinkan untuk mengamati objek-objek diluar objek penelitian utama (*secondary object*) yang mendukung objek yang diteliti. Dalam kasus penelitian ini, objek lain yang dapat diteliti adalah para pembaca media, pelaku atau korban dalam tindak kekerasan beragama, pemerintah daerah setempat serta tokoh-tokoh lain terkait. Pengamatan juga dilakukan tentang peredaran media yang diteliti pada wilayah objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan pada sumber utama, yakni para jurnalis yang meliput di wilayah konflik. Jumlah responden diambil dengan proporsional random sampling dari seluruh awak media (jurnalis) yang meliput pada wilayah tersebut. Penelitian diarahkan pada para jurnalis yang masing-masing media diwakili oleh salah satu jurnalisnya (selanjutnya hasil penelitian terhadap jurnalis tidak berarti mewakili kualitas media yang bersangkutan).

Selain terhadap objek utama, sumber lain yang akan memperkuat hasil penelitian ini adalah dengan mengambil wawancara dari tokoh-tokoh terkait media dan pemberitaan pada wilayah tersebut. Tokoh tersebut bisa pelaku atau korban tindak kekerasan agama, tokoh masyarakat setempat atau tokoh pemerintahan. Wawancara juga dilakukan terhadap pembaca media untuk mengukur dampak dari berita yang disajikan oleh wartawan yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Langkah pengumpulan data dengan dokumentasi adalah dengan membuka kembali arsip-arsip pemerintahan, arsip pribadi tokoh atau catatan-catatan non ilmiah lainnya, termasuk catatan audio visual yang merekam gambaran konflik yang terjadi. Bukti dokumentasi inimenunjuk pada masa lampau dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti suatu peristiwa, aktivitas dan kejadian tertentu.

Dokumentasi dilakukan untuk mendukung dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Bentuk dokumentasi dapat berupa foto yang diambil selama penelitian berlangsung. Selain foto, juga dalam bentuk audio visual (video) yang dapat diambil untuk memperkuat data-data selama proses penelitian. Dokumentasi juga dilakukan

melalui *voice recorder* untuk bukti wawancara yang dilakukan.

d. Literasi

Pengumpulan data bersumber dari literasi dilakukan dengan melihat kembali arsip-arsip pemberitaan lama yang telah ditulis oleh para wartawan di media masing-masing atau rekam audio visual untuk jurnalis televisi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat data awal yang disajikan serta data tambahan dari proses wawancara yang dilakukan.

6. Analisis Data

Dari data-data yang diambil diatas, selanjutnya dilakukan langkah prosesing data. Data-data baik primer maupun sekunder dilakukan proses reduksi dengan metode analisis yang sistematis, data diperoleh dikumpulkan dari dokumentasi, observasi, interview mereduksi dan kemudian menyimpulkan menjadi penyajian data yang siap publis sesuai kaidah penulisan ilmiah. Penyajian data ini juga merupakan tujuan akhir dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun hasil penelitian ini, akan dilakukan penulisan secara sistematis dengan mendasarkan pada kerangka penulisan ilmiah yang berlaku. Sistematika penulisan dibagi dalam lima bab dengan subbab yang bervariasi pada masing-masing bab sesuai dengan kebutuhan. Adapun secara terperinci dapat disampaikan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang akan membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, lokasi penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menggambarkan secara global tentang rencana penyusunan penelitian ini.

Pada bab berikutnya, menjelaskan tentang ilmu komunikasi, konstruksi pemberitaan, media massa, regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, teori analisis framing dan analisis media. Di dalam bab ini juga dijelaskan tentang landasan teori yang digunakan, yakni teori *peace journalism* secara singkat.

Bab ketiga menjelaskan tentang aktivitas jurnalis dalam kerja jurnalistik, gambaran umum tentang latar belakang dan objek yang diteliti, tugas pokok wartawan, aliansi kewartawanan, serta gambaran umum tentang konflik bernuansa SARA dalam pemberitaan media.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Pembahasan dilakukan dengan mengkonfrontir keterangan dari objek yang diteliti, data-data pendukung (*secondary object*) dengan alat bedah analisis framing.

Bab kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan sebagai rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh hasil penelitian ini merupakan perpaduan dari data-data literer yang terkait dengan tema pembahasan serta temuan-temuan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian para professional, tentu masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian sejumlah data-data tentang tema penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi salah satu bahan dalam pengambilan data-data serta referensi dasar.

Jurnalisme dan konflik merupakan hal yang saling bersentuhan, konflik merupakan objek yang subjeknya 'dikendalikan' wacananya oleh jurnalisme. Selanjutnya dari produk wacana yang dihasilkan dipublikasikan secara luas. Baik konflik ataupun jurnalisme memiliki hubungan yang saling mengikat satu sama lain.

Bahwa jurnalisme dapat jadi menjadi pemadam kebakaran terhadap konflik yang terjadi, namun juga sebaliknya, ia mampu menjadi bahan bakar yang semakin mempertajam konflik bahkan hingga terjadi benturan fisik sebagai dampak dari konflik dasar yang terjadi.

Secara umum, dalam penelitian yang dilakukan terhadap para jurnalis di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung

dan Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah ini menghasilkan simpulan sebagai berikut;

1. Sebagian besar wartawan tidak mengikuti pelatihan jurnalistik yang dilakukan oleh organisasi kewartawanan yang diikuti maupun perusahaan media yang mempekerjakan mereka. Hal ini menyebabkan pengetahuan, teknik dan pemahaman terhadap bidang tugas serta hal-hal lain yang melingkupinya masih kurang dipahami. Sebagian besar wartawan tidak pernah memahami tentang produk perundang-undangan yang dikeluarkan negara (UU Pers, UU KIP, UU ITE, UU Penyiaran dan sebagainya), dikeluarkan oleh organisasi kewartawanan (Kode Etik Jurnalistik) maupun regulasi lain yang menyangkut tugas pokok mereka. Hal ini menyebabkan hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, ancaman dan perlindungan terhadap tugas kerja sebagai wartawan tidak dipahami dengan baik.
2. Ketidakpahaman terhadap regulasi dan serta tidak pernah mengikuti pelatihan menyebabkan penerapan atas regulasi yang mengikat tidak dilakukan. Dalam hal konflik bernuansa SARA, khususnya konflik agama, wartawan tidak mengetahui dasar-dasar dan prosedur dalam membuat produk jurnalistik yang tepat. Dengan demikian, wartawan justru lebih berperan

sebagai peningkat eskalasi konflik dibanding menjadi peredam konflik.

3. Dalam menuliskan berita konflik, wartawan lebih memilih untuk lebih banyak mengambil keterangan dari aparat dan pemerintah (sebagai pemegang kuasa) dibanding pihak yang berkonflik. Hal ini didasarkan pola relasional yang telah dekat dan adanya unsur gratifikasi baik tertutup maupun terbuka. Banyak pengakuan dalam penulisan berita bernuansa konflik agama tidak diikuti dengan pembahasan akar masalah (*prinsip peace journalism*) dan hanya menyoroti dampaknya (*war journalism*) sehingga rawan menimbulkan reaksi dari publik.
4. Pola gratifikasi, dependensi, kepentingan media dan personal, relasional masih menjadi penghambat dalam pembuatan produk jurnalistik. Sebagian besar wartawan mengakui menjadikan faktor tersebut sebagai penghambat untuk menjadi wartawan profesional, tetapi tidak pernah menjalankan atau melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak wartawan profesional. Bahwa ada kesadaran menerima gratifikasi, tidak independen, keterikatan personal masih dilakukan oleh wartawan meskipun pada dasarnya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan. Wartawan yang mendapatkan gratifikasi dari pemegang kuasa cenderung akan meninggalkan prinsip *cover both sides, balancing* dan independen dalam penulisan berita.

Gratifikasi diberikan oleh pemegang kuasa dalam bentuk gratifikasi terbuka (pemberian uang, material atau fasilitas secara langsung) maupun gratifikasi tertutup (pemberian uang, material, atau fasilitas yang mendapatkan perlindungan dari produk perundang-undangan/kebijakan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)).

B. Saran

Atas temuan diatas, peneliti berharap agar perusahaan media sebagai pemegang kuasa atas wartawan memberlakukan aturan perusahaan yang tegas yang disandarkan pada produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan aturan perusahaan yang tegas, maka wartawan yang bekerja di lapangan akan lebih professional.

Misalnya, akar masalah dari gratifikasi adalah tingkat kesejahteraan yang minim, mendasarkan pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan media wajib untuk memberikan gaji dan atau tunjangan. Fakta yang terjadi masih banyak wartawan yang menerima gaji dibawah upah minimum regional (UMR). Hal ini memicu berkembangnya gratifikasi karena desakan kebutuhan yang lebih tinggi dibanding pendapatan yang diterima.

Terhadap wartawan yang belum bergabung dengan organisasi kewartawanan disarankan untuk bergabung dan aktif mengikuti pelatihan

yang diselenggarakan. Sebab wartawan dapat dikatakan professional atau tidak secara legal diakui dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Dengan mengikuti organisasi kewartawanan maka pengetahuan wartawan terhadap regulasi serta hal lain yang mengikat dapat lebih dimiliki serta memiliki legalitas pengakuan dari negara.

Selanjutnya kepada Dewan Pers dan organisasi kewartawanan sebaiknya aktif menggelar pelatihan di daerah-daerah dibanding hanya memusatkan pelatihan di kota-kota besar. Hal ini memicu terjadinya diferensiasi antara wartawan kota dan wartawan daerah yang didasarkan pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abrar, Ana Nadhya, M.E.S., PhD, *Analisis Pers, Teori dan Praktik*, Jogjakarta: Cahaya Ama Pustaka, 2011.
- Adam, Ahmat B., *Sejarah Awal pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*, Jakarta: Hastamitra, 1995.
- Arkoun, Mohammed, Dr., *Rethinking Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996.
- Berger, Charles R. dkk, *Handbook Ilmu Komunikasi* Bandung: Nusa Media, 2014.
- Birowo, Mario Antonius, *Perlukan Perspektif Asia dalam Kajian Ilmu Komunikasi?*, dalam Pappilon H. Manurung (Ed), *Komunikasi dan Kekuasaan*, Jogjakarta: Forum Studi Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007.
- Boff, Leonardo, *Ethic Fuer Eine Neue Welt*, dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Jakarta; Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 2003.
- Canggara, Hafied, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Danesi, Marcel, *Pengantar Memahami Semiotika Media*, Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

- Daya, Burhanuddin, Prof. Dr., *Agama Dialogis, Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antaragama*, Yogyakarta; Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004.
- Delia, J.G., *Communication Research: A History*, dalam C.R. Berger & S. H. Chaffee (Eds), *Handbook of Communication Science*, Newbury Park, CA: Sage, 1987.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, *Peranan Media Massa Lokal Bagi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah*, Jogjakarta: Depdikbud DIY, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dewan Pers, *Problematisasi Kemerdekaan Pers di Indonesia* Jakarta: Dewan Pers dan Unesco, 2009.
- Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Jogjakarta: LKiS, 2012.
- Everett M., Rogers, *Communication Technology The New Media in Society*, London: The Free Press, 1986.
- Galtung, Johan, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992.
- Hanafi, Hassan, *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradisi Barat*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- _____, *Islam sebagai Sebuah Prinsip Universal*, dalam *Islam dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam ditengah Krisis*

- Humanisme Universal*, Semarang; IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Harsono, Andreas, *A9ama Saya adalah Jurnalisme*, Yogyakarta; Kanisius, 2014.
- Haryanto, Ignatius, *The New York Times, Menulis Berita Tanpa Takut atau Memihak*, Jakarta: Penerbit Obor, 2006.
- Husein, Fatimah, *Muslim-Christian Relations The New Order Indonesia, The Exclusivist and Inclusivist Muslims Perspectives*, Bandung; Mizan, 2005.
- J. Severin, Werner. W. Tankard, James Jr, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009
- Keeble, Richard, John Tulloch and Florian Zollmann (eds), *Peace Journalism, War and Conflict Resolution*, London: Peter Lang Inc., 2010.
- Kempf, Wilhelm and Dov Shinar (eds), *Peace Journalism: the State of the Art*, Berlin: Regener, 2007.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel, *The Elements of Journalism*, New York: Crown Publishers, 2001
- Lynch, Jake and Annabel McGoldrick, *Peace Journalism*, Stroud: Hawthorn Press, 2005.
- _____, *Peace Journalism, What is it?, What to do?*, www.reportingtheworld.com, 2000.

_____, *Peace Journalism*, Stroud: Hawthorn Press, 2005.

Lynch, Jake and Johan Galtung, *Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism*, Australia: Queensland University Press), 2010.

Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalisme, Cultural Divesity and Politcal Theory*, 2nd Edition, Yogyakarta; Impulse, 2012.

Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Jogjakarta: LKiS, 2008.

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, *Pemetaan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui kerangka alur kerja analisis gender dan anak sebagai data pembuka : Laporan Penelitian, Pemprov DKI Jakarta dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran*, Jakarta : Pemprov DKI, 2004.

Pickering, Peg, *How to Manage Conflict*, Jakarta; Esensi, 2006.

Pilliang, Yasraf Amir, *Hipерsemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003.

Rachmadi, F., *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Sardar, Ziauddin, *Membongkar Kuasa Media*, Jogjakarta: Resist Book, 2008.

Siregar, R.H., *Setengah Abad Pergulatan Etika Pers*, Jakarta: Dewan Kehormatan PWI, 2005.

Sudiboyo, Agus, Citra Bung Karno, *Analisis Berita Pers Orde Baru*, Jogjakarta: Bigraf Publishing, 1999.

Sukadi, Wina Armada, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Jakarta: Dewan Pers, 2007.

Syah, Sirkit, *Rambu-Rambu Jurnalistik, Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Syahputra, Iswandi, *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peiputan di Area Konflik*, Jakarta: P_IDEA, 2006.

Tim Peneliti Sejarah Pers di Indonesia, Leknas-LIPI, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

II. JURNAL/PAPER/PRESS RELEASE

Laporan Pengurus Pusat PWI kepada Kongres IX PWI di Lembang, Bandung tahun 1959

Thomas Hanitzsch, *Rethinking Journalism Education in Indonesia; Nine Theses*, Mediator: Jurnal Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No. 1 Tahun 2001

III. RUJUKAN WEB

Data-data diperoleh dari mengikuti Pers Conference yang diselenggarakan oleh The Wahid Institute Jakarta dan siaran pers The Wahid Institute melalui *official sites* <http://www.wahidinstitute.org>

Thomas Jefferson, surat kepada George Washitngon pada 9 September 1792, diambil dari <http://www.about.com> pada 20 Mei 2015, pukul 18.30 WIB.

www.dewanpers.or.id/page/data/organisasi/, diakses pada 25 Mei 2015

<http://news.okezone.com/read/2014/10/09/340/1050365/ganjar-plesirkan-wartawan-ke-jerman-aji-semarang-protes>, pada 25 Mei 2015

<http://civiciislam.blogspot.com/2015/04/apakah-media-massa-berkontribusi.html> pada 25 Mei 2015

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/05/nja7mb-syiah-sering-dikesankan-islam-padahal-bukan> pada 26 Mei 2015

http://video.tvonenews.tv/arsip/view/48336/2011/02/08/polisi_periksa_5_saksi_terkait_kerusuhan_di_temanggung, pada 20 Mei 2015

<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/20/058546651/Ketua-FPI-Jawa-Tengah-Tuding-Banser-Mencegatnya>, pada 27 Mei 2015

<http://regional.kompas.com/read/2014/03/16/1605056/Ormas.GPK.Ungkap.Alasan.Penyerangan.Hotel.Citra.Dewi> pada 27 Mei 2015

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Heru Suyitno, wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk wilayah eks-Karsidenan Kedu.
2. Anis Efizudin, wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Foto untuk wilayah Eks. Karsidenan Semarang dan Kedu.
3. Firman Eko Handy, kontributor BeritaSatu, CakraTV Semarang dan stringer TransTV untuk wilayah eks. Karsidenan Kedu.
4. Issahani Alachrie, wartawan Radar Kedu untuk wilayah Kabupaten Temanggung.
5. Regina Rukmorini, wartawan Kompas untuk wilayah Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya.
6. Raditya Yoni Aria, wartawan Suara Merdeka untuk wilayah Kabupaten Temanggung. Sebelumnya merupakan wartawan Republika dan Bernas Jogja.
7. Kiswanto, kontributor MetroTV untuk wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Temanggung. Yang bersangkutan sebelumnya merupakan stringer dari MetroTV dan pernah bergabung menjadi stringer di RCTI dan SCTV.

8. Yusuf Fathoni, *stringer* tvOne dan NET TV untuk wilayah Kabupaten Wonosobo dan Temanggung.
9. Pristiyono, wartawan Jawa Pos-Radar Semarang untuk wilayah Kabupaten Semarang.
10. Wahib Pribadi, yang bersangkutan merupakan wartawan Jawa Pos-Radar Semarang sekaligus sebagai Ketua Komunitas Wartawan Demak (Kawede).
11. Wikha Setyawan, wartawan Koran Sindo untuk wilayah Kota Semarang.
12. Setyo Wuwuh, wartawan koran Magelang Ekspres untuk wilayah Kabupaten Temanggung.
13. Edy Purnomo, wartawan Suara Merdeka untuk wilayah liputan Kabupaten Wonosobo.
14. Rizal Ivan, wartawan Magelang Ekspres yang meliput di wilayah Kabupaten Temanggung.
15. Zaini Arrosyid wartawan Kedaulatan Rakyat yang meliput wilayah Kabupaten Temanggung dan sekitarnya.
16. Sumadiyono, wartawan Harian Jogja (Bisnis Indonesia Grup) untuk wilayah liputan eks-Karsidenan Kedu, merupakan warga Kabupaten Wonosobo.
17. Subagyo, wartawan Wawasan untuk wilayah liputan Semarang.
18. Ketua FPI Jawa Tengah, Ust. Syihabudin.
19. Ketua DPP FPI Habib Rizieq Syihab.

20. Amirrudin, mantan Ketua GP Ansor Kabupaten Wonosobo yang juga wartawan Wonosobo Ekspres.
21. Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, Jariyah
22. M. Fasiun, warga Desa Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung
23. Mohammad As'adi, mantan wartawan Republika untuk wilayah eks-Karsidenan Kedu.
24. Anif Punto Utomo, mantan redaktur senior Republika dan majalah IAGI, yang bersangkutan merupakan aktivis media yang telah lebih dari 25 tahun bergelut dengan dunia jurnalistik.
25. Tosiani, wartawan Media Indonesia untuk wilayah liputan Eks-Karsidenan Kedu bagian utara (Magelang, Temanggung dan Wonosobo).
26. Wiedyas Cahyono, wartawan Wawasan untuk wilayah liputan Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.
27. Putut Trihusodo, mantan wartawan Tempo dan sekarang menjadi Wakil Pimpinan Redaksi Liputan 6 SCTV.
28. Sejumlah narasumber anonim yang tidak bersedia disebutkan namanya, namun keterangan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Analisis Framing Pada Pemberitaan Konflik

Kuisisioner penelitian ini dilakukan untuk penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan konflik yang menyangkut dengan SARA.

Hasil penelitian selanjutnya ditelaah dan dianalisis untuk mejadi produk ilmiah dalam bentuk tesis penelitian Studi Agama dan Resolusi Konflik, Prodi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERTANYAAN UMUM

Nama Responden	: Anif Punto Utomo
TTL/Usia	: 52
Alamat	: Jln Kebagusan II/23
No. Telp/HP	: 0811154822
Email	: anifpunto@gmail.com
Nama Media	: Majalah Berita IAGI
Bidang/Wilayah Kerja	: Nasional
Aliansi Kewartawanan	: (PWI/AJI/AWI/IJTI/dsb)
Lama Bekerja	: 25 tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Pengalaman Organisasi/Kerja	: Banyak

WARTAWAN DAN KODE ETIK

1. Konflik adalah salah satu subjek dari sasaran liputan wartawan. Bagaimana independensi wartawan dalam konflik?

Independensi tetap harus dipertahankan. Caranya:

1. Tidak melibatkan diri secara kepentingan terhadap pihak-pihak yang berkonflik
 2. Tidak takut terhadap ancaman dan _egara dari pihak yang berkonflik
 3. Tidak berpihak
2. Bagaimana anda menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita konflik?

Bisa dilihat dari berbagai sisi, beberapa di antaranya:

1. Netral dalam pemberitaan
 2. Tidak memanaskan-manasi suasana dengan tulisan yang provokatif
 3. Jika ada kekerasan tidak boleh membuat foto yang terlalu vulgar (misalnya foto orang kena bacok di kepala)
3. Khusus untuk konflik SARA, banyak ditemukan berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Pendapat anda?

Pelanggaran kode etik tidak boleh dibiarkan terjadi. Apapun suasananya, kode etik harus tetap jadi pegangan. Perlu pembekalan materi jurnalistik yang memadai buat wartawan, karena sebagian wartawan tidak paham, bahkan mungkin tidak pernah membaca UU Pers dan yang terkair dengan kode etik

4. Bagaimana anda memahami pasal 8 Kode Etik Jurnalistik tentang pemuatan isu SARA pada pemberitaan dan bagaimana menerapkan yang tepat?

Pasal 8 yang berbunyi, *“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”*.

Isu SARA sangat _egara_io di Indonesia, karena itu perlu kehati-hatian dalam meliput dan memberitakannya. Fakta-fakta dalam berita tetap diungkapkan, tetapi pilihan kata harus tepat dan dipilih bahasa yang sehalus mungkin agar tidak menyinggung. Jangan memakai kalimat yang provokatif.

5. Apa yang anda pahami tentang kerja pers yang _egara_ional sebagaimana disebutkan pada pasal 2 Kode Etik Jurnalistik?

Meskipun wartawan memiliki kebebasan menulis, tetapi tetap memiliki koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar. Jika berita itu membahayakan keselamatan _egara, tidak perlu diberitakan. Ini masalah nasionalisme.

Begitu juga jika ada konflik antaragama. Tidak semua berita yang diperoleh _ega dikonsumsi oleh _egara. Pada prinsipnya wartawan harus mempertimbangkan patut tidaknya memuat tulisan atau gambar yang membahayakan _egara ataupun membahayakan keamanan masyarakat.

6. Bagaimana menulis berita tentang konflik dengan melandaskan Kode Etik Jurnalistik? (Sama dengan pertanyaan nomor 3)

WARTAWAN DAN BERITA KONFLIK

Sing iki by phone wae Baz, mengko tak telp

1. Banyak ditemukan kasus, menulis atau menayangkan berita kurang mempertimbangkan *balancing* dan *cover both sides* yang dipicu kedekatan wartawan dengan salah satu pihak yang berkonflik. Contoh konflik Islam dan Kristen, karena wartawan beragama Islam sedikit condong membela Islam. Menurut anda?
2. Relasi yang dibangun lebih dekat dengan aparat (baik pemerintah maupun keamanan/pertahanan) menyebabkan wartawan sering menulis/menayangkan kasus dengan mengedepankan versi aparat dibanding fakta di lapangan. Menurut anda?
3. Disiplin verifikasi berita dan menulis atau menyiarkan berita yang komprehensif dan kurang profesional sering dilupakan karena factor menerima gratifikasi dari narasumber tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat anda dalam hal ini?
4. Bagaimana menjaga independensi wartawan dalam peliputan berita?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abaz Zahrotien

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 28 Juli 1986

Alamat Rumah : Karangsari, Punggelan, Banjarnegara

Alamat Kantor : Jl. Sundoro No. 61 Temanggung

Nama Ayah : H. Ali Ma'sum

Nama Ibu : Hj. Sarkinah

B. Riwayat Pendidikan

SD Karangsari 03, Punggelan, Banjarnegara lulus tahun 1999

SLTP N 1 Pekuncen, Banyumas lulus tahun 2002

SMK N 1 Bawang Banjarnegara pindah tahun 2003

SMK Takhassus Al Qur'an Wonosobo lulus tahun 2005

Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo lulus tahun 2009

Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

Wartawan Jawa Pos 2009-2015

Penulis Lepas PT Leutika Yogyakarta

Penulis Lepas PT Pupuk Kalimantan Timur

D. Prestasi/Penghargaan

-

E. Pengalaman Organisasi

Ketua PMII Cabang Wonosobo

Koordinator Jaringan GUSDURian Temanggung

Ketua Komunitas Fotografi Temanggung (Koforte)

Sekretaris Forum Jurnalis Temanggung (FJT)

F. Minat Keilmuan

Sosiologi, Komunikasi dan Agama

G. Karya Ilmiah

1. Buku

- a. Inspeksi Teknik (Internal PT Pupuk Kaltim)
- b. Pelabuhan dan Pengapalan (Internal PT Pupuk Kaltim)
- c. Inovasi Teknik Kimia Ir. Ezrinal Aziz (Internal PT Pupuk Kaltim)
- d. Human Resource Management (Internal PT Pupuk Kaltim)
- e. Pemeliharaan dan Mekanik Lapangan (Internal PT Pupuk Kaltim)

2. Artikel

Berita dan artikel di Jawa Pos Radar Semarang

3. Film Dokumenter

- a. Kota Teror, Temanggung
- b. Kota di Kaldera, Dieng Banjarnegara
- c. Dialog Kultural Pertapaan Rowoseneng, Temanggung.
- d. Pesantren Toleransi, Cangkringan, Sleman
- e. Peace Building Pembakaran Gereja di Temanggung
- f. Upacara Adat Lintas Agama Rowoseneng, Temanggung

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Abaz Zahrotien